

PENGUATAN EKONOMI LOKAL: KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK Mendukung Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Rara Ayudiyah Olii¹, Rizkiyanto Ibrahim², Astrid Saputri Hasan³, Pratiwi Mahmud⁴

Universitas Ichsan Gorontalo Utara

raraayudiyah3008@gmail.com¹, rizkiibrahim5555@gmail.com²,
astrid.saputri@gmail.com³, pratiwi.mahmud@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam memperkuat ekonomi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Desa Cisadane. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan, seperti bantuan peralatan usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sektor pertanian dan perikanan, belum sepenuhnya efektif akibat pendekatan top-down, koordinasi antar-dinas yang lemah, dan kurangnya pendampingan berkelanjutan. Strategi yang diidentifikasi paling efektif adalah penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal melalui penyediaan akses teknologi, pemasaran, dan modal, serta penguatan kelembagaan BUMDes dan kolaborasi multipihak. Simpulan penelitian menekankan pentingnya penerapan pendekatan terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan untuk mentransformasi potensi ekonomi lokal menjadi kekuatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih kontekstual dan efektif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi lokal.

Kata Kunci: Ekonomi Lokal, Kebijakan Pemerintah Daerah, Ekonomi Inklusif, Pembangunan Berkelanjutan, Governance Kolaboratif

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the policies and strategies of the Regional Government of North Gorontalo Regency in strengthening the local economy to support inclusive and sustainable economic growth in Cisadane Village. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results show that the policies implemented, such as business equipment assistance, skills training, and development of the agriculture and fisheries sector, have not been fully effective due to a top-down approach, weak inter-agency coordination, and lack of ongoing mentoring. The strategies identified as most effective are strengthening leading sectors based on local potential through the provision of access to

technology, marketing, and capital, as well as strengthening BUMDes institutions and multi-stakeholder collaboration. The conclusion of the study emphasizes the importance of implementing an integrated, participatory, and sustainable approach to transform the potential of the local economy into an inclusive and sustainable economic force. The implications of this research can be the basis for more contextual and effective policy formulation for local governments in strengthening the local economy.

Keywords: *Local Economy, Local Government Policies, Inclusive Economy, Sustainable Development, Collaborative Governance*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu bangsa tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi secara agregat, namun juga dari bagaimana manfaat dari pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Kamran et al., 2023). Ekonomi inklusif dan berkelanjutan telah menjadi paradigma global yang menekankan pada perluasan kesempatan ekonomi, pengentasan ketimpangan, dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang (Xetor & Mensah, 2025). Dalam konteks ini, perekonomian lokal seringkali menjadi fondasi sekaligus barometer utama untuk menilai keberhasilan pembangunan yang inklusif (Masri, 2025). Penguatan ekonomi lokal tidak hanya menciptakan lapangan kerja di tingkat akar rumput tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari bawah. Namun, pencapaian tujuan luhur ini menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan intervensi yang strategis dan terarah (Hutajulu et al., 2024). Di Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan dan keanekaragaman daerah yang luar biasa, potensi ekonomi lokal merupakan aset strategis yang belum sepenuhnya tergali secara optimal (Hartanti et al., 2025). Potensi tersebut mencakup sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi penopang hidup bagi sebagian besar masyarakat. Sayangnya, banyak potensi ini masih terbentur pada berbagai masalah klasik, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya akses kepada teknologi dan pasar, serta infrastruktur yang belum memadai. Akibatnya, kontribusi ekonomi lokal terhadap perekonomian yang lebih luas seringkali tidak maksimal dan rentan terhadap guncangan ekonomi.

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah memegang peran yang sangat krusial dan strategis sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat lokal. Melalui kewenangan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki ruang gerak untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan serta potensi unik yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing (Fadeli, 2024). Kebijakan-kebijakan ini dapat berupa insentif fiskal, pendampingan dan

pelatihan UMKM, pembangunan infrastruktur pendukung, promosi produk lokal, hingga regulasi yang mendukung iklim investasi yang sehat. Efektivitas dari kebijakan daerah inilah yang pada akhirnya akan menentukan apakah potensi ekonomi lokal dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan (Suhardi & Panjaitan, 2025). Namun, seringkali terdapat kesenjangan antara harapan dan realita dalam implementasi kebijakan penguatan ekonomi lokal tersebut (Desa et al., 2025). Banyak pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kendala tersebut meliputi kapasitas kelembagaan yang terbatas, koordinasi yang lemah antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pendanaan yang tidak memadai. Selain itu, pendekatan yang bersifat top-down dan proyek-oriented tanpa melibatkan partisipasi aktif dari pelaku usaha dan masyarakat lokal seringkali berujung pada kebijakan yang tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk memahami strategi seperti apa yang paling efektif (Xaba et al., 2024).

Dalam implementasi kebijakan penguatan ekonomi lokal tersebut, banyak pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kendala tersebut meliputi kapasitas kelembagaan yang terbatas, koordinasi yang lemah antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta pendanaan yang tidak memadai (Melnik & Leshchukh, 2021). Selain itu, pendekatan yang bersifat top-down dan project-oriented tanpa melibatkan partisipasi aktif dari pelaku usaha dan masyarakat lokal seringkali berujung pada kebijakan yang tidak efektif dan tidak berkelanjutan. Kontekstualisasi permasalahan ini dapat dilihat secara nyata di Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagai daerah pesisir, desa ini memiliki potensi ekonomi lokal yang besar, khususnya di sektor perikanan tangkap dan olahan hasil laut, serta pariwisata bahari. Namun, potensi ini belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Pelaku usaha, yang didominasi oleh nelayan tradisional dan pengolah ikan skala rumahan, masih menghadapi masalah mendasar seperti keterbatasan modal untuk pengembangan usaha, kurangnya keterampilan dalam manajemen dan pemasaran, serta akses terhadap teknologi pengolahan yang masih terbatas. Imbasnya, produk yang dihasilkan seringkali memiliki nilai jual yang rendah dan kesulitan menembus pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, peran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengatasi masalah tersebut di Desa Cisadane dinilai masih belum optimal. Kebijakan yang ada cenderung bersifat seremonial dan jangka pendek, seperti bantuan alat tangkap atau pelatihan yang sporadis tanpa adanya pendampingan dan evaluasi berkelanjutan. Koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten dalam merancang program yang terpadu juga masih lemah. Akibatnya, berbagai program yang

diluncurkan tidak menyentuh akar permasalahan dan gagal menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif bagi masyarakat. Kondisi di Desa Cisadane ini merupakan miniatur dari tantangan yang dihadapi oleh banyak daerah lain, sehingga menjadikannya sebagai studi kasus yang sangat relevan.

Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Wijaya (2022) dengan judul *"Strategi Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Ekonomi Lokal dan Inklusivitas di Kabupaten Banyuwangi"* menemukan bahwa kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada kolaborasi multipihak terbukti paling efektif. Studi mereka menyimpulkan bahwa dua kebijakan kunci yakni pembentukan hub digital untuk pemasaran produk UMKM lokal dan program pendampingan berkelanjutan yang melibatkan akademisi telah berhasil meningkatkan omset pelaku usaha rata-rata sebesar 35% dalam dua tahun serta significantly memperluas jangkauan pasar hingga tingkat nasional. Keberhasilan ini ditopang oleh komitmen anggaran yang konsisten dari APBD dan governance yang transparan. Namun, penelitian mereka juga mengidentifikasi kelemahan utama pada aspek keberlanjutan program setelah project period berakhir, di mana ketergantungan pada pendamping eksternal masih tinggi tanpa adanya mekanisme alih pengetahuan yang memadai kepada pelaku lokal. Temuan ini memberikan perspektif valuabel bahwa kesuksesan sebuah strategi tidak hanya ditentukan oleh perancangan kebijakannya saja, tetapi juga pada aspek tata kelola, sustainabilitas pendanaan, dan pembangunan kapasitas jangka panjang (Cahyanto & Afifah, 2025).

Sebagaimana penelitian lainnya, yang dilakukan oleh Febriyanti & Dharma (2021) dalam artikel *"Dampak Kebijakan Fasilitasi Infrastruktur terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro di Daerah Tertinggal"* yang fokus pada Kabupaten Sumba Tengah justru menemukan bahwa intervensi kebijakan yang bersifat fisik-infrastruktural (seperti bantuan gedung pasar rakyat dan akses jalan) tanpa diiringi dengan pendampingan soft skill yang memadai memiliki efektivitas yang terbatas. Penelitian mereka mengungkapkan bahwa infrastruktur baru terbangun dengan baik, peningkatan volume penjualan pedagang hanya sebesar 12% angka yang jauh di bawah ekspektasi. Hal ini disebabkan oleh belum berubahnya pola-pola pemasaran tradisional dan rendahnya inovasi produk. Temuan kunci mereka menunjukkan bahwa investasi infrastruktur 'keras' (hard infrastructure) hanya menjadi faktor pemungkin (enabling factor) dan bukan pendorong utama (driver) bagi pertumbuhan ekonomi inklusif. Keberlanjutan usaha justru sangat bergantung pada faktor 'lunak' (soft skills) seperti kemampuan digital marketing, manajemen keuangan, dan akses permodalan, yang dalam penelitian tersebut tidak menjadi fokus kebijakan pemerintah daerah. Studi ini memberikan perspektif kritis bahwa strategi penguatan ekonomi lokal memerlukan keseimbangan yang sinergis antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM secara komprehensif (Azzahra, 2023). Berdasarkan penelitian-penelitian

tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas strategi pemerintah daerah dalam penguatan ekonomi lokal untuk mendukung ekonomi inklusif dan berkelanjutan sangat bergantung pada pendekatan yang terintegrasi dan berimbang antara intervensi infrastruktur keras (*hard infrastructure*) dan penguatan kapasitas SDM serta kelembagaan (*soft infrastructure*), di mana keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan program dalam jangka pendek melainkan oleh komitmen keberlanjutan, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan mekanisme alih pengetahuan yang memastikan kemandirian pelaku usaha lokal setelah intervensi program berakhir.

Dari uraian permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Strategi Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Mendukung Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan, dengan mengambil studi kasus di Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menjadi urgent untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris dan rekomendasi kebijakan yang praktis bagi pemerintah daerah. Dengan memahami strategi yang efektif, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan potensi lokal, yang pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis Strategi Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Mendukung Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan. Penelitian ini menjadi urgent untuk dilakukan guna memberikan gambaran empiris dan rekomendasi kebijakan yang praktis bagi pemerintah daerah. Dengan memahami strategi yang efektif, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya untuk memberdayakan potensi lokal, yang pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara. Objek penelitian adalah Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah Desa dan kecamatan, Tokoh masyarakat, lembaga desa lainnya, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat terkait. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan dan tematik. Data yang diperoleh dari wawancara mendalam, observasi, serta studi dokumen akan dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Majid, 2017). Analisis kebijakan akan dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung swasembada pangan dan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi

pola, hubungan, dan tantangan utama yang muncul dari data lapangan (Judijanto et al., 2024). Data sekunder, seperti laporan pemerintah daerah, statistik ketahanan pangan, serta kebijakan terkait, akan diuji dengan pendekatan triangulasi sumber guna memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Cisadane adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Berada di jalan Siswa, Desa Cisadane memiliki luas wilayah 442,4 Ha/m² yang berada pada dataran rendah dengan jumlah penduduk 1629 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 471. Adapun suhu rata-rata harian berkisar 28 Derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Curah hujan rata-rata pertahun 125 mm/Tahun. Desa ini dapat dicapai melalui jalur darat dari ibu kota kabupaten, yaitu Kabupaten Gorontalo Utara, yang berjarak sekitar 15 kilometer. Desa Cisadane merupakan pemekaran dari Desa Moluo yang dilakukan pada tahun 2011 dengan di bagi wilayah menjadi 3 Dusun yakni Dusun Benteng, Dusun Tariyono dan Dusun Cemelati.

Sebagian besar penduduk Desa Cisadane bergantung pada pertanian, terutama padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Tanaman kopi dan kakao, Desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang meliputi hutan dan sumber air. Terdapat fasilitas dasar seperti sekolah, puskesmas, dan balai desa. Infrastruktur seperti listrik dan jaringan telekomunikasi masih dalam tahap pengembangan, akses internet terbatas pada beberapa area, dan kecepatan serta kualitas koneksi dapat bervariasi. Di daerah pedesaan seringkali masih ada tantangan dalam hal cakupan sinyal dan kualitas jaringan, namun di Desa Cisadane untuk signal sudah cukup memadai karena sangat dekat dengan pusat Kabupaten dan Kecamatan. Di Desa Cisadane, transformasi digital dalam pelayanan administrasi sudah dalam tahap pengembangan.

Banyak proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pendaftaran penduduk, pengeluaran sertifikat, dan pencatatan transaksi desa, sudah sepenuhnya dialihkan ke sistem digital. Meskipun ada beberapa upaya untuk memperkenalkan teknologi, infrastruktur dan perangkat yang memadai masih terbatas, sehingga beberapa layanan tetap bergantung pada dokumen kertas dan prosedur manual.

Yang menjadi batas wilayah Desa cisadane adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Moluo
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Moluo dan Desa Titidu
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Posso
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Bulalo

Sebagian besar lahan di Desa Cisadane merupakan tanah yang berbentuk lahan atau tanah kering sebesar kurang lebih 351 Ha dan lahan basah sebesar kurang lebih 91 Ha. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-

fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Dari pendapat tersebut mengidentifikasi bahwa penelitian Strategi Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Mendukung Ekonomi Inklusif Dan Berkelanjutan khususnya di Desa Cisadane Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, peneliti harus dapat memperhatikan dan memahami agar dalam menggali subjek penelitian lebih tepat sehingga memenuhi tujuan penelitian.

Efektivitas Kebijakan dan Strategi yang dapat diterapkan Pemerintah Daerah dalam Memperkuat Ekonomi Lokal dalam Upaya Mewujudkan Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan di Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara

Ekonomi lokal berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial. Khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara, rendahnya daya saing UMKM, keterbatasan akses permodalan, serta ketergantungan terhadap sektor pertanian dan perikanan masih menjadi kendala utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Hal tersebut sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) Gorontalo Utara, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi PDRB dengan kontribusi sekitar 50%, sementara sektor industri pengolahan dan perdagangan masih berkembang secara terbatas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah juga menunjukkan dinamika yang signifikan, dengan penurunan pada tahun 2020 sebesar -1,27% akibat pandemi, namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yakni pada tahun 2023 naik pertumbuhan positif menjadi 11,16%, menunjukkan tren positif yang berkelanjutan. Dengan begitu maka, perlunya adanya strategi yang lebih inovatif dalam memperkuat ekonomi lokal, terutama dengan meningkatkan nilai tambah sektor unggulan dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha kecil. Disisi lain pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam dan memperlebar kesenjangan sosial. Misalnya, sektor perikanan di Gorontalo Utara menghadapi tantangan berupa praktik penangkapan ikan yang berlebihan tanpa regulasi yang ketat, yang dapat mengancam kelestarian sumber daya laut dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, akademisi, dan komunitas lokal.

Penguatan ekonomi lokal telah menjadi fokus utama dalam berbagai kajian akademik dan kebijakan, terutama dalam konteks pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Sebagaimana penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, strategi penguatan ekonomi lokal tidak hanya bergantung pada pertumbuhan sektor unggulan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan pemerintah daerah mampu

menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung (Suyudi & Fasih Khan, 2025). Disisi lain dikatakan bahwa, penguatan ekonomi lokal harus berbasis pada pemanfaatan sumber daya daerah, peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi.

Kebijakan pemerintah daerah telah mengalami transformasi signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama setelah diberlakukannya desentralisasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayahnya. Desentralisasi memungkinkan daerah untuk lebih fleksibel dalam menyusun kebijakan ekonomi yang berbasis lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks ekonomi lokal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah yang berhasil adalah yang mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif melalui regulasi yang mendukung investasi, penguatan UMKM, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Konsep ekonomi inklusif dan berkelanjutan telah menjadi perhatian utama dalam berbagai penelitian dan kebijakan pembangunan di tingkat global maupun lokal (Djadji & Adindarena, 2025). Ekonomi inklusif menekankan pada partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan seperti UMKM, perempuan, dan masyarakat berpenghasilan rendah, dalam proses ekonomi agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata. Sedangkan ekonomi berkelanjutan berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, ekonomi inklusif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika ada kebijakan yang mendorong akses ke pendidikan, layanan keuangan, serta perlindungan terhadap sumber daya alam sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan kunci dan observasi lapangan, penelitian ini mengungkap beberapa temuan penting mengenai efektivitas kebijakan dan strategi penguatan ekonomi lokal di Desa Cisadane. Pertama, kebijakan pemerintah daerah melalui program bantuan usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sektor pertanian telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif. Implementasinya seringkali tidak tepat sasaran dan kurang berkelanjutan, sehingga hanya memberikan dampak jangka pendek bagi masyarakat. Kedua, dari sisi penerima manfaat, mayoritas masyarakat Desa Cisadane yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan mengaku bahwa bantuan yang diberikan belum menyentuh kebutuhan utama mereka. Sarana produksi, akses pemasaran, dan modal berkelanjutan menjadi tiga

hal kritis yang paling dibutuhkan namun belum terpenuhi secara optimal melalui program-program yang ada.

Sementara itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dianggap paling tepat oleh pelaku lokal adalah penguatan sektor unggulan desa berbasis potensi lokal. Hasil pertanian seperti jagung dan kelapa serta hasil laut memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui dukungan teknologi pertanian, akses pupuk, pelatihan pengolahan hasil, dan perluasan akses pasar ke luar daerah. Peran BUMDes dan kolaborasi dengan pihak swasta diidentifikasi sebagai faktor pengungkit penting dalam menciptakan rantai nilai ekonomi yang inklusif. Namun dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat masih terbatas sebagai pekerja, belum sebagai pengelola yang memiliki kontrol atas rantai produksi dan distribusi. Pemerintah desa memainkan peran krusial sebagai jembatan antara kebijakan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat. melalui dana desa, pemerintah setempat telah berupaya melengkapi program daerah dengan kegiatan padat karya dan penguatan UMKM lokal, namun kapasitas kelembagaan yang terbatas menjadi kendala dalam optimalisasi program.

Penelitian mengungkapkan bahwa pendekatan top-down dalam perencanaan program menyebabkan ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan spesifik masyarakat Desa Cisadane. Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan mengakibatkan program seringkali tidak kontekstual dan kurang diterima oleh masyarakat. Disisi lain aspek keberlanjutan menjadi masalah utama dalam implementasi kebijakan. Program-program cenderung bersifat jangka pendek dan project-oriented tanpa mekanisme pendampingan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi yang memadai untuk memastikan keberlangsungan dampak program. Digitalisasi desa dan keterbukaan informasi menjadi faktor pendukung yang belum optimal dimanfaatkan. Akses terhadap teknologi informasi dan platform digital masih terbatas, sehingga menghambat perluasan pemasaran produk lokal dan pertukaran informasi yang diperlukan untuk pengembangan usaha.

Temuan penelitian ini mengonfirmasi teori Local Economic Development (Blakely & Leigh, 2010) yang menekankan pentingnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara optimal. Namun, implementasinya di Desa Cisadane menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih parsial dan tidak terintegrasi. Seperti yang diungkapkan oleh kepala desa, bantuan yang diberikan seringkali tidak tepat sasaran dan kurang berkelanjutan, yang mengakibatkan dampak program tidak optimal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa menjadi faktor penghambat utama yang konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya di daerah tertinggal. Kendala ini diperparah oleh pendekatan top-down dalam perencanaan yang

mengabaikan local wisdom dan partisipasi masyarakat, sehingga program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Desa Cisadane.

Temuan mengenai pentingnya penguatan sektor unggulan dan peran BUMDes sejalan dengan konsep pembangunan inklusif yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Optimalisasi peran BUMDes dan kolaborasi dengan pihak swasta dapat menciptakan rantai nilai yang lebih adil dimana masyarakat tidak hanya sebagai pekerja tetapi juga sebagai pengelola yang memiliki kontrol atas proses produksi dan distribusi. Berdasarkan temuan penelitian, peneliti merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan empat aspek kunci: (1) penguatan kapasitas kelembagaan desa dan BUMDes; (2) penerapan pendekatan bottom-up dalam perencanaan program; (3) pengembangan sistem pendampingan dan monitoring berkelanjutan; dan (4) pemanfaatan teknologi digital untuk perluasan akses pasar dan informasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan penguatan ekonomi lokal dapat lebih efektif dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Desa Cisadane.

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh analisis dan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam memperkuat ekonomi lokal di Desa Cisadane masih belum optimal. Meskipun berbagai program seperti bantuan usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sektor pertanian dan perikanan telah diimplementasikan, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencapai sasaran dan dampak yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh pendekatan yang masih bersifat top-down, kurangnya koordinasi antar dinas, serta ketiadaan mekanisme pendampingan dan evaluasi yang berkelanjutan. Akibatnya, masyarakat yang bergantung pada sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan masih menghadapi kendala dalam hal akses modal, teknologi, pemasaran, dan infrastruktur pendukung. Kedua, strategi yang paling efektif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Desa Cisadane adalah melalui penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal dengan pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif. Strategi ini mencakup penyediaan sarana produksi, akses teknologi, pelatihan pengolahan hasil, serta perluasan jaringan pemasaran yang didukung oleh kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Penguatan kelembagaan desa dan BUMDes juga menjadi kunci penting agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai pekerja, tetapi juga sebagai pengelola yang mandiri dan berdaya saing. Selain itu, integrasi kebijakan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (green policy) diperlukan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ketiga, keberhasilan strategi penguatan ekonomi lokal sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan governance

yang baik, menyediakan pendanaan yang berkelanjutan, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan. Sinergi yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi fondasi utama untuk menciptakan kebijakan yang kontekstual, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat mentransformasi potensi ekonomi lokal Desa Cisadane menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengurangan kesenjangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Ucapan terima kasih yang tulus disampaikan kepada DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025 yang telah memberikan dana hibah penelitian melalui skema Penelitian Strategis Nasional, sehingga seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar dan optimal. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara serta Pemerintah Desa Cisadane, Kecamatan Kwandang, yang telah memberikan izin, fasilitas, dukungan data, dan kemudahan selama proses penelitian di lapangan berlangsung. Penghargaan dan terima kasih yang mendalam disampaikan kepada Bapak Ismail Amin (Kepala Desa Cisadane), seluruh perangkat desa, tokoh masyarakat, pengelola BUMDes, dan seluruh narasumber serta partisipan yang telah meluangkan waktu, berbagi pengalaman, pengetahuan, dan data dengan penuh keterbukaan dan keikhlasan, tanpa itu semua penelitian ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para rekan sejawat dan para kolega di lingkungan akademisi yang telah memberikan masukan, saran konstruktif, serta semangat kolaborasi selama tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga analisis penelitian. Akhirnya, terima kasih disampaikan kepada para pembimbing dan mentor yang telah memberikan bimbingan akademik, koreksi, serta pendampingan intelektual yang sangat berharga dalam proses penulisan dan penyempurnaan laporan ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus. Semoga segala kontribusi, dukungan, dan kebaikan yang diberikan dapat menjadi amal shaleh dan berkah bagi semua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pembangunan ekonomi lokal, serta upaya mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, G. S. G. (2023). *Implementasi SDGs Pada Isu Stunting Dalam Perspektif Islam Dan Pembangunan Di Desa Kaligelang Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang*. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Cahyanto, G. D., & Afifah, A. N. (2025). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Octuple*

- Helix untuk Meningkatkan Daya Saing Desa Wisata di Kawasan Geopark Kebumen*. Jurnal Semarak Kabumian, 3(1), 9–25.
- Desa, D., Energi, U., & Dampak, M. (2025). *Dari Desa Untuk Energi: Memeriksa Dampak Kepemimpinan Perempuan Lokal Pada Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Bojonegoro*. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 12(2), 197–210.
- Djadjji, O. U., & Adindarena, V. D. (2025). *Potensi dan Strategi Peningkatan Kualitas SDM BUMdes Berbasis Kompetensi Era Industri 5.0*. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 12(2), 457–472.
- Fadeli, R. (2024). *Aspek Hukum Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Humani, 1(1).
- Hartanti, N. B., Fatmawati, T. N., Punto, W., Mohammad, I., & Christina, S. (2025). *Strategi Pengembangan Wilayah Berkelanjutan Kabupaten Sukabumi Melalui Optimalisasi Potensi Lokal: Pengelolaan Pariwisata Gurilaps, Pertanian, dan Ekonomi Kreatif*. Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, 11–30.
- Hutajulu, H., Runtunuwu, P. C. H., Judijanto, L., Ilma, A. F. N., Ermanda, A. P., Fitriyana, F., Mudjiyanti, R., Maichal, M., Boari, Y., & Laksono, R. D. (2024). *Sustainable Economic Development: Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Judijanto, L., Wibowo, G. A., Karimuddin, K., Samsuddin, H., Patahuddin, A., Anggraeni, A. F., Raharjo, R., & Simorangkir, F. M. A. (2024). *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kamran, M., Rafique, M. Z., Nadeem, A. M., & Anwar, S. (2023). *Does Inclusive Growth Contribute Towards Sustainable Development? Evidence from Selected Developing Countries*. Social Indicators Research, 165(2), 409–429. <https://doi.org/10.1007/s11205-022-03020-6>
- Majid, A. (2017). *Analisis data penelitian kualitatif*. Penerbit Aksara Timur.
- Masri, M. (2025). *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Inklusif dan Berkelanjutan di Kabupaten Sikka*. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 8(1), 49–62. <https://doi.org/10.33005/jdep.v8i1.722>
- Melnyk, M., & Leshchukh, I. (2021). *Diversification Of Local Structural Economic Policy Of Cities: Conceptual Aspect*. Market Infrastructure, 55. <https://doi.org/10.32843/infrastructure55-20>
- Suhardi, S., & Panjaitan, P. (2025). *Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah*

- dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional*. Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE), 3(1), 42–55.
- Suyudi, A., & Fasih Khan, R. B. (2025). *Pengaruh Work Life Balance Dan Motivasi Terhadap Loyalitas Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi Pada Pt Sims Jaya Kaltim*. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 12(1)(2), 238–256.
- Xaba, M. R., Nokukhanya Jili, & Mandisi Matyana. (2024). *Evaluating the effectiveness of local economic development strategies within UMhlathuze Local Municipality*. International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478), 13(2), 265–275. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v13i2.2997>
- Xetor, L. E., & Mensah, J. (2025). *Inclusive Growth and Sustainable Development Nexus: Where Is the Synergy?* Sustainable Development, 33(4), 6189–6197. <https://doi.org/10.1002/sd.3430>